



## DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



# LAPORAN KINERJA 2024

[www.disperkim.madiunkota.go.id](http://www.disperkim.madiunkota.go.id)

Graha Krida Praja Lantai 3 Jalan

Mayjend DI Panjaitan Nomor 17

Telp (0351) 2812737

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun tahun 2024.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja dan sasaran strategis yang dilakukan pada tahun 2024, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2019 - 2024, Rencana Kerja tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan atas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas keterlibatan semua jajaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang telah memberikan karyanya untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.

Madiun, 07 Maret 2025  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



JEMAKIR, S.P.,  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 196708171995031006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Gambaran Umum
- E. Permasalahan dan Isu Strategis
- F. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Permasalahan
- C. Upaya Peningkatkan Kinerja

LAMPIRAN

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Terdapat tiga indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Madiun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2019-2024 serta program prioritas Pemerintah Kota Madiun yang lainnya. Adapun pencapaian indikator tersebut secara keseluruhan mencapai 106 persen atau masuk dalam kategori diatas espektasi. Dari ketiga indikator semua masuk kedalam kriteria diatas ekspektasi, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,15 Indeks	4,31 Indeks	103,86%
2	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Indeks Perumahan Permukiman	99,90 %	99,90%	100%
		Indeks Pengelolaan PSU RTH, PJU dan Permukiman	82,76 %	98%	118,41%







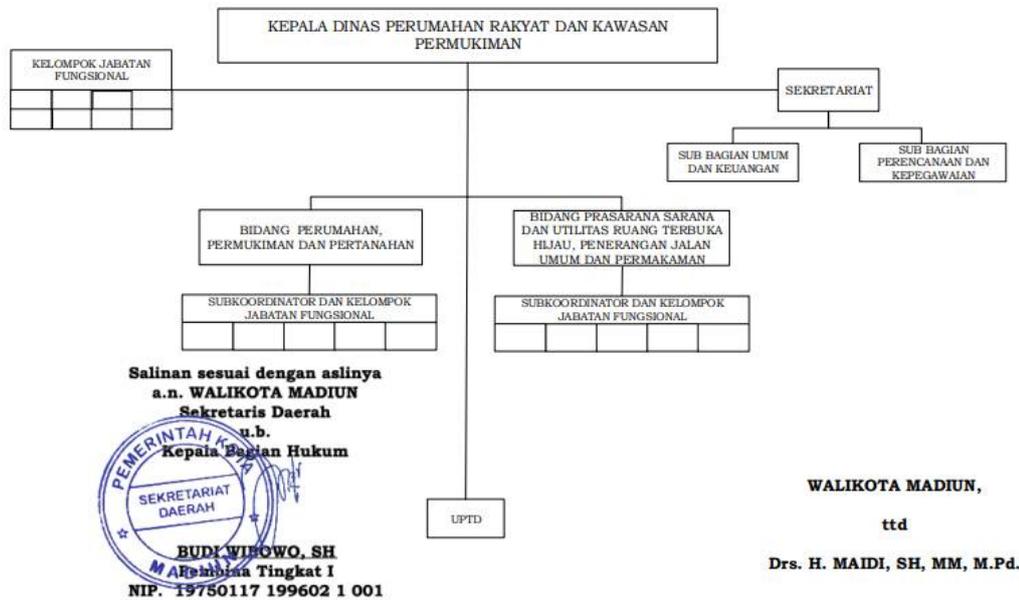


#### **D. Gambaran Umum**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja . Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
- c. Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari:
  1. Sub Koordinator Perumahan;
  2. Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh; dan
  3. Sub Koordinator Pertanahan
- d. Bidang Bidang Prasarana Sarana Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Permakaman, terdiri dari :
  1. Sub Koordinator Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau;
  2. Sub Koordinator Permakaman; dan
  3. Sub Koordinator Penerangan Jalan Umum
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel  
 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
 Permukiman  
 Kota Madiun



Sesuai Bagan diatas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memegang 2 urusan yaitu urusan perumahan dan Kawasan permukiman dan urusan pertanahan sehingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun melakukan penanganan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan, pertanahan, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum, Permakaman.

### D.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan perumahan, pertanahan, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas ruang terbuka hijau, penerangan

jalan umum, pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan perumahan, pertanahan, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum, pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembangunan perumahan, pertanahan, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum, pemakaman;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan perumahan, pertanahan, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum, pemakaman;
- d. pelaksanaan pengoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan



Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
2. pelaksanaan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah;
3. melaksanakan penyelenggaraan penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
4. pelaksanaan penyelenggaraan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan;
5. pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
6. pelaksanaan penyelenggaraan pemugaran, penataan atau peremajaan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
7. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin pertanahan (izin perubahan penggunaan tanah dan izin lokasi);
8. pelaksanaan penyelenggaraan inventarisasi dan rekomendasi subyek dan obyek redistribusi tanah;
9. pelaksanaan penyelenggaraan inventarisasi, koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar;
10. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi konsolidasi tanah;
11. pelaksanaan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara tanah garapan;
12. penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang





No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
13.	Layar Proyektor dan Proyektor	1	Unit	Baik
14.	Lemari Arsip Kayu	2	Unit	Baik
15.	Komputer	19	Unit	Baik
16.	Laptop	10	Unit	Baik
17.	Printer	14	Unit	Baik
18.	Dispenser	3	Unit	Baik
19.	Papan Tulis	2	Unit	Baik
20.	Sofa	2	Unit	Baik
21.	Kipas Angin	2	Unit	Baik
22.	Sepeda Motor	19	Unit	Baik
23.	Kendaraan Roda 3	17	Unit	Baik
24.	Mobil Dump Truck	2	Unit	Baik
25.	Pick Up	4	Unit	Baik
26.	Mobil Dump Truck	2	Unit	Baik
27.	Pick Up	4	Unit	Baik
28.	Mobil Crane (kecil)	3	Unit	Baik
29.	Truck Tangki	6	Unit	Baik
30.	Mobil Hidrolis PJU (Double Cabin)	1	Unit	Baik
31.	Mobil Hidrolis PJU (Besar)	1	Unit	Baik
32.	Pick Up Double Cabin	1	Unit	Baik
33.	Mobil Crane	3	Unit	Baik
34.	Mobil Crane Beban	1	Unit	Baik
35.	Mobil Innova	1	Unit	Baik

## E. Permasalahan dan Isu Strategi

### E.1 Permasalahan

- a. Permasalahan terkait Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  1. Rasio rumah layak huni di Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebesar 99,65%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 0,35% rumah tidak layak huni di Kota Madiun
  2. Di Kota Madiun kawasan permukiman kumuh sudah tidak ada lagi (0%), namun demikian dalam rangka pencegahan tumbuh lagi permukiman kumuh masih perlu penanganan terhadap komponen komponen lingkungan yang belum tuntas
  3. Rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Madiun pada tahun 2018 mencapai 98,87% sehingga masih terdapat 1,13% rumah tinggal yang belum bersanitasi
  4. Masih terdapat kekurangan kebutuhan rumah (*backlog kepemilikan*) dalam rangka penyediaan perumahan bagi Masyarakat didapatkan data pada tahun 2016 mencapai 3.569 unit
  5. Belum optimalnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
  6. Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman
  7. Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah sebagai dampak pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun
  8. Kecenderungan pertumbuhan investasi di Kota Madiun berdampak pada permintaan ijin lokasi untuk perolehan tanah dalam rangka investasi
  9. Masih adanya tanah terlantar di Kota Madiun yang perlu penanganan

10. Adanya potensi konflik pertanahan di Kota Madiun seiring meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.
- b. Permasalahan terkait Bidang Pertamanan, Permakaman, dan Penerangan Jalan Umum
  1. Belum optimalnya sarana dan prasarana 83 makam aset Pemerintah Kota Madiun
  2. Coverage layanan Penerangan Jalan Permukiman yang perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan Perumahan dan Permukiman di Kota Madiun dengan memperhatikan maintenance, penataan iluminasi serta peralatan dan utilitas pendukung lainnya.
  3. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas RTH Kota Madiun hingga 20% dari luas kota

## **E.2 Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun sebagai berikut:

### **Urusan Perumahan Permukiman**

1. Pengembangan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dituangkan dalam peraturan di daerah
2. Pengembangan kebijakan penyediaan rumah tinggal, sarana dan prasarana serta utilitas (PSU) perumahan yang dituangkan dalam peraturan di daerah
3. Penyediaan atas peningkatan kualitas lingkungan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program pemugaran, peremajaan atas pemukiman kumuh





## **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar perjanjian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2024 meliputi Renstra Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

## **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Uraian tentang capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun tahun 2024, sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2019-2024, meliputi pengukuran kinerja, perkembangan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran, evaluasi dan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja, serta realisasi keuangan. Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

## **BAB IV : PENUTUP**

Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun tahun 2024 dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang pencapaian target kinerja, serta realisasi keuangan. Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendukung Visi dan Misi Walikota Madiun dalam pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, sedangkan misi merupakan suatu pernyataan yang menetapkan apa yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Oleh karena itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik, baik dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun sebagai unsur teknis yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan perumahan, permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, pemakaman dan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah mendukung misi ke 2 :

**“MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Visi tersebut diatas memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar serta strategis sebagai landasan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan pembangunan di Kota Madiun pada satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan

oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran adalah pernyataan hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Dapat dikatakan bahwa tujuan merupakan capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun (jangka menengah), sedangkan sasaran merupakan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun (jangka pendek). Penetapan tujuan dan sasaran berfungsi sebagai arah dari kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan regulasi sumber daya yang dimiliki untuk diimplementasikan dalam penetapan strategi berupa program dan kegiatan. Keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Tujuan**

Terwujudnya permukiman yang ramah maju dan berwawasan lingkungan.

### **2. Sasaran**

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		2024
1	2	3
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,15 Indeks
Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Indeks Perumahan Permukiman	99,90 %
	Indeks Pengelolaan PSU RTH, PJU dan Permukiman	82,76 %

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan dari penyusunan Perjanjian kinerja yaitu sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan kinerja dalam suatu organisasi. Perjanjian kinerja organisasi diambil dari Renstra (Rencana Strategis) Organisasi Perangkat Daerah. Tahapan dalam penyusunan Perjanjian kinerja dimulai dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2019-2024, dijabarkan secara bertahap dalam rencana kinerja tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,15 Indeks
2	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Indeks Perumahan Permukiman	99,90 %
		Indeks Pengelolaan PSU RTH, PJU dan Permukiman	82.76 %

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.207.724.111
2	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.922.750.000
3	KAWASAN PERMUKIMAN	17.433.326.000
4	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	16.746.929.527
5	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	32.413.750
6	PENATAGUNAAN TANAH	773.378.500
	<b>Jumlah</b>	<b>46.310.729.638</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun tidak terlepas dari mekanisme perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) dilingkungan Pemerintah Kota Madiun. Selain itu mengacu pada pelaksanaan pembangunan yang selanjutnya sampai pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan dengan mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur dan terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dapat dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian



$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

## 2. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

### 2.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya

#### Kualitas Pelayanan Publik

##### 2.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Berikut ini disajikan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,15 Indeks	4,31 Indeks	103,86%

##### 2.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu, yaitu tahun 2024 dibanding 5 tahun sebelumnya sebagaimana Tabel 3.3 berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		3,76 Indeks	3,80 Indeks	4,15 Indeks	4,31 Indeks

### 2.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Renstra 2019-2024

Berikut ini disajikan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan Target akhir Renstra sebagaimana Tabel 3.4 berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,31 Indeks	4,31 Indeks	100%

## 2.2 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Sehat

### 2.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Berikut ini disajikan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, sebagaimana Tabel 3.5 berikut:





4. Melakukan penataan sumber daya aparatur melalui peningkatan kapasitas serta kapabilitas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

#### 4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui efisiensi anggaran terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah, maka perlu dihitung tingkat efisiensinya. Efisiensi diperlukan untuk membandingkan antara rata-rata persentase capaian kinerja dengan persentase serapan anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan. Penghitungan efisiensi dapat dilakukan apabila capaian kinerja sama dengan atau lebih besar dari 100%, dengan rumus penghitungan :

$$\text{Efisiensi} = \% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Serapan Anggaran}$$

Apabila hasil perhitungan efisiensi kurang dari 1 maka penyerapan anggaran kurang efisien dan apabila hasilnya lebih dari 1 maka penyerapan anggaran sudah efisien. Hasil dari perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja terhadap sasaran strategis perangkat daerah realisasi anggaran untuk mendukung sasaran strategis sebagaimana Tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	103,86 %	96%	92 %
2	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Indeks Perumahan Permukiman	100 %	92%	92 %
		Indeks Pengelolaan PSU RTH, PJU dan Permukiman	118,41 %	89%	75 %

Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Kinerja

## 5. Hasil Pelaksanaan Gender

Dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender di daerah Kota Madiun, telah dilakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Kota Madiun telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun juga telah membentuk tim berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Nomor : 411-401.111/08/2024 tentang Penunjukan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.

Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender bertugas Mempromosikan PUG pada unit kerja dan melaporkan Hasil pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun. Laporan Data Terpilah Gender melalui aplikasi SIDEKAN (Sistem Informasi Data Gender dan Anak) Kota Madiun, telah diupload 7 kegiatan selama tahun 2024 sebagai sampling pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan hasil sebagaimana Tabel

No	Kegiatan Tersampling	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta Laki-laki	Jumlah Peserta Perempuan
1	Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	6	250 (54%)	210 (46%)
2	Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas	1	100 (57%)	75 (43%)



## B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2024 yang tertuang didalam DPPA Tahun 2024 sebesar Rp. 47.116.521.888 , Realisasi belanja APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	Capaian		
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.207.724.111	9.818.198.979	96
2	Program Pengembangan Perumahan	1.922.750.000	1.884.597.240	98
3	Program Kawasan Permukiman	17.433.326.000	15.421.221.816	88
4	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	16.746.929.527	16.298.014.793	97
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	32.413.750	28.762.650	89
6	Program Penatagunaan Tanah	773.378.500	648.764.414	84
<b>JUMLAH</b>		<b>47.116.521.888</b>	<b>44.099.559.892</b>	<b>94</b>

Untuk mengetahui efisiensi anggaran terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah, maka perlu dihitung tingkat efisiensinya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

LKj-IP ini merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan dan program maupun kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun di tahun berikutnya.

Adapun kesimpulan capaian tujuan, sasaran dan indikator dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pelayanan Publik dengan target 4,15 Indeks sedangkan realisasinya 4,31 skor atau tercapai 103,86% termasuk dalam kategori capaian kinerja sangat baik dengan rating kinerja diatas ekspektasi
2. Indeks Perumahan Permukiman dengan target 99,90% sedangkan realisasinya 99,90% atau tercapai 100% termasuk dalam kategori sangat baik dengan rating kinerja diatas ekspektasi.
3. Indeks Pengelolaan PSU RTH, Penerangan Jalan dan Permakaman dengan target 82,76% sedangkan realisasinya 98% atau tercapai 118,41% termasuk dalam kategori sangat baik dengan rating kinerja diatas ekspektasi.

Realisasi yang telah dicapai ini akan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan perencanaan ditahun berikutnya.



Demikian Laporan Kinerja 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, semoga LKj-IP ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pelaksanaan pembangunan dan program maupun kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun. Oleh karena itu masukan dan saran terhadap penyusunan LKj-IP ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Madiun, 07 Maret 2025  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



JEMAKIR, S.P.,  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 196708171995031006

Pohon Kinerja OPD	
OPD	Class Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun	2021

Strategic	
Strategik	Peningkatan kualitas pelayanan publik
Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Target / Satuan	83,5 index
Keterangan	

Tactical	
Tactical	Peningkatan administratif kinerja pelayanan
Indikator	Nilai SKRP Peringkat Daerah
Target / Satuan	82,30 nilai
Keterangan	

Tactical	
Tactical	Peningkatan kapasitas pelayanan publik
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat
Target / Satuan	85,531 nilai
Keterangan	

Operational	
Operasional	Meningkatkan kualitas pelayanan online
Indikator	Nilai Kemampuan Pelayanan SKRP
Target / Satuan	20 nilai
Keterangan	-

Operational	
Operasional	Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja
Indikator	Nilai kemampuan pelayanan kinerja SKRP
Target / Satuan	22 nilai
Keterangan	-

Operational	
Operasional	Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja
Indikator	Nilai kemampuan pelayanan SKRP
Target / Satuan	11 nilai
Keterangan	-

Operational	
Operasional	Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja
Indikator	Nilai kemampuan pelayanan SKRP
Target / Satuan	18,30 nilai
Keterangan	-

Operational	
Operasional	Meningkatkan tingkat administrasi kependudukan online
Indikator	Persentase akses online layanan yang disediakan setiap waktu
Target / Satuan	100 %
Keterangan	-

Operational	
Operasional	Peningkatan kualitas layanan dan prosedur
Indikator	Persentase capaian dan prosedur layanan yang tepat waktu
Target / Satuan	100 %
Keterangan	-

Operational	
Operasional	Meningkatkan tingkat kemampuan pelayanan
Indikator	Persentase administratif kecapaian sesuai ketentuan yang ditetapkan
Target / Satuan	100 %
Keterangan	-

Tactical	
Tactical	Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan
Indikator	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti
Target / Satuan	100 %
Keterangan	-

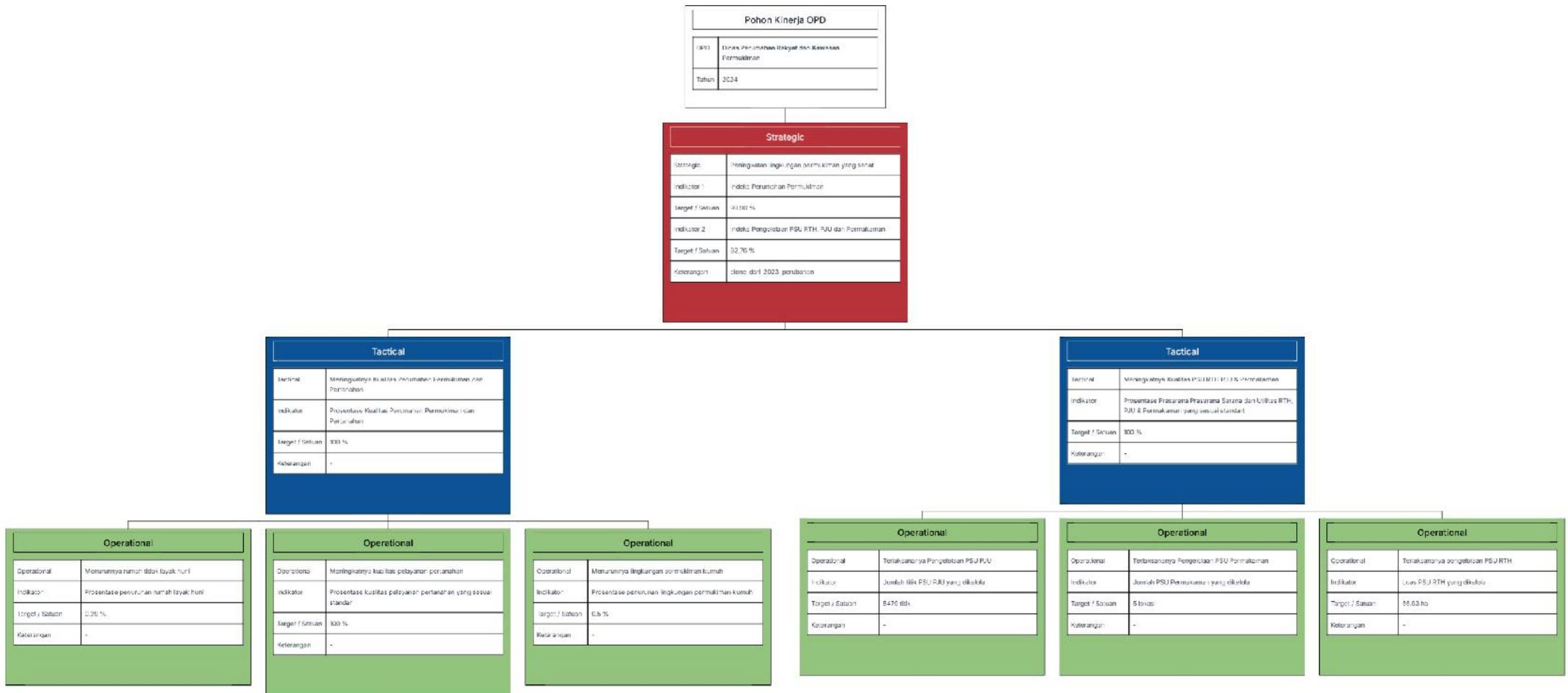
Tactical	
Tactical	Peningkatan Kinerja ASN
Indikator	Persentase capaian SKP ASN minimal bernilai baik
Target / Satuan	100 %
Keterangan	-

Operational	
Operasional	Penyusunan administratif laporan keuangan sesuai SOP
Indikator	Persentase penyempurnaan laporan keuangan tepat waktu
Target / Satuan	100 %
Keterangan	-

Operational	
Operasional	Pengembangan kompetensi ASN
Indikator	Persentase SDM yang memenuhi minimal standar pengembangan kompetensi
Target / Satuan	100 %
Keterangan	-

Operational	
Operasional	Peningkatan disiplin pegawai
Indikator	Persentase ASN yang taat aturan
Target / Satuan	100 %
Keterangan	-

Pohon kinerja (Peningkatan kualitas pelayanan publik)



*Pohon Kinerja (Peningkatan lingkungan permukiman yang sehat)*



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi		
										2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				1	104	10401	15	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Persentase Rumah Tinggal Layak Huni dan Bersantitas		99.53%	2,116,404,000	-	-	-	-	-	-	-	99.53%	2,116,404,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							001	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan data/ Kajian Perumahan	Jumlah dokumen		1 dokumen	153,370,000	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	153,370,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							002	Kegiatan Penyediaan Perumahan	Jumlah lokasi		0 lokasi	152,726,000	-	-	-	-	-	-	-	0 lokasi	152,726,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							003	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan	Jumlah lokasi		1 lokasi	179,888,000	-	-	-	-	-	-	-	1 lokasi	179,888,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							005	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Permukiman	Jumlah dokumen		1 dokumen	96,900,000	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	96,900,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							006	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah lokasi		1 kecamatan	799,520,000	-	-	-	-	-	-	-	1 kecamatan	799,520,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							007	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Permukiman	Jumlah lokasi		10 lokasi	734,000,000	-	-	-	-	-	-	-	10 lokasi	734,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				2	204	10401	15	Program Pelayanan Pertanahan	Persentase Pelayanan Pertanahan		100%	116,650,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	116,650,000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							001	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Pertanahan	Jumlah dokumen		2 dokumen	116,650,000	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	116,650,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	104	10401	16	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Pemakaman	Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola		73.70%	17,496,173,700	-	-	-	-	-	-	-	73.70%	17,496,173,700	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							001	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Ruang Terbuka Hijau	Jumlah dokumen		0 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	0 dokumen	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							002	Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya	Jumlah lokasi		1 lokasi	2,147,600,000	-	-	-	-	-	-	-	0 lokasi	2,147,600,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi			
								2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
					003	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya	Jumlah lokasi	59 lokasi	9,322,871,200	-	-	-	-	-	-	-	-	59 lokasi	9,322,871,200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
					006	Kegiatan Penyediaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik	100 Titik	1,579,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 Titik	1,579,200,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
					007	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik	5536 Titik	4,164,002,500	-	-	-	-	-	-	-	-	5536 Titik	4,164,002,500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
					009	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan dan Pembuatan Data/ Kajian Pemukiman	Jumlah dokumen	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 dokumen	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
					010	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman	Jumlah lokasi	0 lokasi	82,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0 lokasi	82,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
					011	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Pemukiman	Jumlah lokasi	7 lokasi	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 lokasi	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
				1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
				1	04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					36,912,699,474		42,876,419,277		52,180,030,000		54,233,880,000		186,203,028,751	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks RB	1	04	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	80.01	9,312,818,310	80.10	12,021,276,047	80.20	14,364,030,000	80.30	14,413,880,000	80.30	50,112,004,357	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1	04	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	-	-	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	47,000,000	100%	48,000,000	100%	185,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	04	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	20 Dokumen	45,000,000	20 Dokumen	45,000,000	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi	
								2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-	-	-	20 Laporan	47,000,000	20 Laporan	48,000,000	20 Laporan	185,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1 04 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		-	-	100%	5,016,194,000	100%	6,135,000,000	100%	6,135,000,000	100%	6,135,000,000	100%	23,421,194,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1 04 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah		-	-	100%	4,955,194,000	100%	6,074,000,000	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	-	-	34 orang/bulan	6,074,000,000	34 orang/bulan	6,074,000,000	34 orang/bulan	23,177,194,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1 04 01 2.0 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah		-	-	13 Dokumen	61,000,000	13 Dokumen	61,000,000	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		-	-	-	-	-	13 Laporan	61,000,000	13 Laporan	61,000,000	13 Laporan	244,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1 04 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian		-	-	100%	115,000,000	100%	130,010,000	100%	143,150,000	100%	132,000,000	100%	520,160,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1 04 01 2.0 5 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya		-	-	100%	105,000,000	100%	120,010,000	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	-	-	-	-	1 Paket	133,150,000	1 Paket	122,000,000	1 Paket	480,160,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				1 04 01 2.0 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham		-	-	100%	10,000,000	100%	10,000,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	34 orang	10,000,000	34 orang	10,000,000	34 orang	40,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1 04 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum		-	-	100%	183,880,000	100%	183,880,000	100%	183,880,000	100%	183,880,000	100%	735,520,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1 04 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas		-	-	100%	183,880,000	100%	183,880,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-	-	-	20 laporan	183,880,000	20 laporan	183,880,000	20 laporan	735,520,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1 04 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah		-	-	-	-	100%	1,621,321,550	100%	3,375,000,000	100%	3,400,000,000	100%	8,396,321,550	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1 04 01 2.0 7 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan		-	-	-	-	100%	1,437,487,500	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	-	-	-	-	2 Unit	3,300,000,000	2 Unit	3,300,000,000	2 Unit	8,037,487,500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1 04 01 2.0 7 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor		-	-	-	-	100%	183,834,050	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	5 unit	75,000,000	8 unit	100,000,000	8 unit	358,834,050	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1 04 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah		-	-	100%	1,866,821,010	100%	1,969,295,065	100%	2,200,000,000	100%	2,200,000,000	100%	8,236,116,075	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				1.04.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan /perlengkapan kantor yang representatif		-	-	100%	1,866,821,010	100%	1,969,295,065	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	12 Dokumen	2,200,000,000	12 Dokumen	2,200,000,000	12 Dokumen	8,236,116,075	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1.04.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan		-	-	100%	2,085,923,300	100%	1,936,769,432	100%	2,280,000,000	100%	2,315,000,000	100%	8,617,692,732	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1.04.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan		-	-	100%	1,560,360,000	100%	1,470,961,432	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		-	-	-	-	-	65 Unit	1,700,000,000	65 unit	1,800,000,000	65 unit	6,531,321,432	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1.04.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan		-	-	100%	28,000,000	100%	40,000,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	-	-	-	1 unit	100,000,000	1 unit	35,000,000	1 unit	203,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1.04.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan		-	-	100%	497,563,300	100%	425,808,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	-	-	-	106 unit	480,000,000	106 unit	480,000,000	106 unit	1,883,371,300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Terwujudnya permukiman yang ramah, maju dan berwawasan lingkungan		Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat		1 04 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Prosentase Pengembangan Perumahan		-	-	100%	1,292,650,000	100%	2,745,911,000	100%	3,931,000,000	100%	4,900,000,000	100%	12,869,561,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1 04 02 2.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan		-	-	1 Dokumen	76,500,000	1 Dokumen	261,850,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	538,350,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1 04 02 2.0 1 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen data rumah yang dihasilkan		-	-	1 Dokumen	76,500,000	1 Dokumen	261,850,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	538,350,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1 04 02 2.0 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program		-	-	1 lokasi	1,216,150,000	1 lokasi	1,334,111,000	1 lokasi	3,731,000,000	1 lokasi	1,800,000,000	1 lokasi	8,081,261,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1 04 02 2.0 3 06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kota yang terpelihara		-	-	1 Lokasi	1,216,150,000	1 Lokasi	1,334,111,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan		-	-	-	-	-	-	3 Unit Rumah	3,731,000,000	3 Unit Rumah	1,800,000,000	3 Unit Rumah	8,081,261,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				1.04.02.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		-	-	-	-	100%	1,149,950,000	100%	100,000,000	100%	3,000,000,000	100%	4,249,950,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1.04.02.05.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun		-	-	-	-	100%	1,149,950,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		-	-	-	-	-	-	1 laporan	100,000,000	1 laporan	3,000,000,000	100%	4,249,950,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
			Indeks Perumahan Permukiman	1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh</b>		-	-	98.50%	7,283,612,424	99.00%	5,618,815,000	99.50%	6,885,000,000	100%	6,920,000,000	100%	26,707,427,424	<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>Kota Madiun</b>
				1.04.03.2.0	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani		-	-	0.50%	540,097,450	0.50%	102,000,000	0.50%	220,000,000	0.50%	220,000,000	0.50%	1,082,097,450	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1.04.03.2.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh		-	-	1 Dokumen	209,286,000	1 Dokumen	102,000,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		-	-	-	-	-	-	1 dokumen	220,000,000	1 dokumen	220,000,000	1 Dokumen	751,286,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1.04.03.2.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dihasilkan		-	-	1 dokumen	330,811,450	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	330,811,450	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				1 04 03 2.0 3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani		-	-	0.50%	6,743,514,974	0.50%	5,516,815,000	0.50%	6,665,000,000	0.50%	6,700,000,000	0.50%	25,625,329,974	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1 04 03 2.0 3 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen kajian/perencanaan		-	-	3 Dokumen	416,374,334	3 Dokumen	207,890,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		-	-	-	-	-	-	3 dokumen	315,000,000	3 dokumen	300,000,000	3 Dokumen	1,239,264,334	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1 04 03 2.0 3 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase RTLH yang dilakukan perbaikan yang sesuai kriteria		-	-	100%	2,745,395,000	100%	1,458,500,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		-	-	-	-	-	-	160 unit	2,200,000,000	160 unit	2,200,000,000	160 unit	8,603,895,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1 04 03 2.0 3 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh		-	-	3 Lokasi	3,581,745,640	3 Lokasi	3,850,425,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar		-	-	-	-	-	-	16,41 ha	4,150,000,000	16,41 ha	4,200,000,000	16,41 ha	15,782,170,640	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		-	-	100%	19,023,618,740	100%	22,490,417,230	100%	27,000,000,000	100%	28,000,000,000	100%	96,514,035,970	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
			Indeks Pengelolaan PSU RTH, PJU dan Permakama	1 04 05 2.0 1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai		-	-	100%	19,023,618,740	100%	22,490,417,230	100%	27,000,000,000	100%	28,000,000,000	100%	96,514,035,970	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi	
								2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				1 04 05 2.0 1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi Prasarana, sarana dan utilitas umum yang disediakan		-	-	3 Kecamatan	19,023,618,740	3 Kecamatan	22,490,417,230	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		-	-	-	-	-	3 Lokasi	27,000,000,000	3 Lokasi	28,000,000,000	3 Lokasi	96,514,035,970	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
			Indeks Perumahan Permukiman		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			-	-	205,000,000		466,101,600		131,200,000		120,000,000		922,301,600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi		-	-	100%	85,000,000	100%	349,901,600	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	464,901,600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				2 10 02 2.0 1	KEGIATAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase pemberian izin lokasi		-	-	100%	85,000,000	100%	349,901,600	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	464,901,600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				2 10 02 2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Penggunaan Tanah Berusaha	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan		-	-	100%	85,000,000	100%	349,901,600	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	464,901,600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan		-	-	-	-	100%	36,200,000	100%	36,200,000	100%	25,000,000	100%	97,400,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				2 10 04 2.0 1	KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah		-	-	-	-	100%	36,200,000	100%	36,200,000	100%	25,000,000	100%	97,400,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				2 10 04 2.0 1 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian sengketa, konflik, perkara pertanahan yang tertangani		-	-	-	-	100%	36,200,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi	
								2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
						Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	1 Dokumen	36.200.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	97.400.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penatagunaan Tanah		-	-	100%	120.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	360.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				2 10 10 2.01	KEGIATAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah		-	-	100%	120.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	360.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				2 10 10 02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan		-	-	100%	120.000.000	100%	80.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			-	-	-	-	-	10 laporan	80.000.000	10 laporan	80.000.000	10 laporan	360.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
<b>JUMLAH</b>									25.961.342.885		37.117.699.474	-	43.342.520.877	-	52.311.230.000	-	54.353.680.000		213.086.673.286		





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JEMAKIR ,SP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.**

Jabatan : **PJ WALIKOTA MADIUN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.15 Indeks
2.	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Indeks Perumahan Permukiman	99.90 %
		Indeks Pengelolaan PSU RTH, PJU dan Permukiman	82.76 %

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.207.724.111
2.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	17.433.326.000
3.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	32.413.750
4.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	773.378.500
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.922.750.000
6.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	16.746.929.527
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 47.116.521.888</b>

Madiun, 06 September 2024  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN  
 RAKYAT DAN KAWASAN  
 PERMUKIMAN**



**EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.**



**JEMAKIR, SP**  
**NIP 196708171995031006**

**PENETAPAN TARGET KINERJA TAHUN 2025  
BERDASARKAN REALISASI TAHUN 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,15 Indeks	4,31 Indeks	4,20 Indeks	
2.	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Indeks Perumahan Permukiman	99,90%	99,90%	99,77%	Bertambahnya usulan baru untuk rumah tidak layak huni
		Indeks Pengelolaan PSU RTH, PJU dan Permakaman	82,76%	98%	98,02%	